

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Jawa Timur

Eko Hariyono^{1*}, Maisyaroh¹

¹Universitas Negeri Malang

*Corresponding author, email: eko.hariyono.2401328@students.um.ac.id

Kata kunci

Penerimaan peserta didik baru

Sekolah menengah kejuruan

Jawa Timur

Sistem pendidikan

Pemerataan pendidikan

Abstrak

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur. PPDB SMK bertujuan untuk memastikan bahwa siswa yang diterima memiliki kompetensi yang sesuai dengan program studi yang ada, serta memfasilitasi pemerataan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan PPDB di SMK Jawa Timur, tantangan yang dihadapi dalam penerimaan siswa, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat sistem PPDB berbasis online yang mengakomodasi transparansi dan efisiensi, namun masih ada beberapa permasalahan seperti ketimpangan akses teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pendaftaran, serta masih terbatasnya pilihan program keahlian yang dapat dipilih oleh peserta didik. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai PPDB, penyediaan fasilitas teknologi yang merata, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri agar PPDB SMK dapat lebih optimal dalam mencetak tenaga kerja terampil dan siap pakai.

1. Pendahuluan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang langsung memengaruhi keberlanjutan proses belajar-mengajar di tingkat sekolah menengah, termasuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada dasarnya, PPDB di SMK bertujuan untuk memastikan penempatan siswa di program keahlian yang sesuai dengan potensi dan minat mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. SMK memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap untuk mengisi kebutuhan industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan PPDB di SMK guna memahami sejauh mana kebijakan ini efektif dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan sistem zonasi dalam PPDB menjadi fokus utama kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Kebijakan zonasi bertujuan untuk meratakan distribusi pendidikan dan memberikan akses yang lebih adil bagi siswa di daerah terpencil atau terpinggirkan. Namun, meskipun kebijakan zonasi berpotensi meningkatkan pemerataan akses pendidikan, implementasinya di SMK menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, ketidakseimbangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kesenjangan dalam kemitraan industri yang mendukung kurikulum pendidikan di SMK. Selain itu, meskipun pemerintah berupaya memfasilitasi PPDB dengan sistem online, tidak semua wilayah di Indonesia, termasuk beberapa daerah di Jawa Timur, memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, yang mengakibatkan terbatasnya akses informasi bagi orang tua dan siswa.

Sistem zonasi pada PPDB bertujuan untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi semua siswa, tanpa mengedepankan faktor prestasi akademik semata. Dalam konteks SMK, zonasi bertujuan agar siswa yang tinggal di sekitar lokasi sekolah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk diterima di SMK yang berada dalam zona mereka. Sistem ini, meskipun diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, justru sering kali menimbulkan beberapa masalah, terutama dalam hal kualitas pendidikan, ketersediaan fasilitas, dan ketersediaan tenaga pendidik yang terampil.

Selain itu, implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB SMK sering kali mengabaikan faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu minat dan bakat siswa dalam memilih program keahlian. Siswa yang terletak di daerah dengan kualitas pendidikan yang lebih rendah sering kali kesulitan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kualitas kurikulum dan pengajaran yang kurang memadai di beberapa SMK juga menjadi kendala besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan. Beberapa SMK di daerah tertentu tidak memiliki program keahlian yang sejalan dengan kebutuhan industri lokal, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara pendidikan dan dunia kerja.

Analisis terhadap implementasi PPDB di SMK menjadi sangat penting, mengingat dampaknya yang luas terhadap kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar di tingkat menengah kejuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan zonasi, akses informasi, dan kualitas fasilitas pendidikan di SMK di Jawa Timur, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja.

Dengan menganalisis sistem PPDB SMK, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki sistem pendidikan di tingkat SMK, agar dapat lebih efektif dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pemerintah daerah, agar kebijakan pendidikan dapat berjalan secara adil dan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah yang terpencil dan kurang berkembang. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah suatu proses seleksi dan penerimaan siswa baru untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMK. PPDB ini bertujuan untuk memilih siswa yang akan menempuh pendidikan kejuruan di sekolah-sekolah yang memiliki program keahlian tertentu, yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

PPDB SMK berbeda dengan PPDB pada Sekolah Menengah Umum (SMA) karena fokus utama di SMK adalah pada pembelajaran keterampilan praktis yang mempersiapkan siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja, melalui berbagai bidang keahlian yang ditawarkan, seperti teknologi informasi, kesehatan, perhotelan, otomotif, industri kreatif, pariwisata dan lain-lain. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses yang menentukan siapa saja yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Proses ini memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Di Jawa Timur, yang merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, implementasi PPDB di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat relevan mengingat peran strategis SMK dalam menyediakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan untuk mendukung sektor industri di tingkat lokal maupun nasional

Pendidikan di SMK memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, yang memiliki keterampilan dan keahlian praktis yang langsung diterapkan di dunia industri. Dalam hal ini, kebijakan PPDB yang tepat sangat penting agar siswa dapat terdistribusi secara merata ke berbagai SMK yang ada di Jawa Timur. Namun, penerapan sistem zonasi dalam PPDB SMK di Jawa Timur menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak, baik bagi siswa, sekolah, maupun dunia industri.

Beberapa tantangan utama yang sering kali muncul dalam implementasi PPDB di SMK Jawa Timur antara lain :

1. Aksesibilitas Informasi: Meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk mempermudah siswa mendapatkan tempat di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka, seringkali terdapat kendala dalam hal akses informasi mengenai proses PPDB. Siswa dan orang tua, terutama yang berada di daerah terpencil, tidak selalu mendapat informasi yang memadai tentang prosedur pendaftaran dan program keahlian yang tersedia di SMK.
2. Kualitas Pendidikan yang Tidak Merata: Kualitas pendidikan di SMK di Jawa Timur sangat bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. SMK yang terletak di daerah

perkotaan biasanya memiliki fasilitas dan sumber daya yang lebih baik dibandingkan dengan SMK di daerah pedesaan atau terpencil.

3. Ketidakmerataan Fasilitas Pendidikan: Beberapa daerah di Jawa Timur, terutama di wilayah pedesaan, masih kekurangan fasilitas pendukung pendidikan yang memadai, seperti laboratorium praktikum, peralatan teknologi, atau guru yang terlatih di bidang kejuruan tertentu. Hal ini membuat kualitas pendidikan di SMK yang ada di daerah-daerah tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kota besar. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan PPDB di SMK Jawa Timur dengan fokus pada beberapa aspek utama, yaitu: (1) efektivitas sistem zonasi dalam pemerataan akses pendidikan, (2) tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPDB, dan (3) solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas implementasi PPDB di SMK di Jawa Timur.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terkait dengan pelaksanaan PPDB, termasuk tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan (pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan siswa) serta solusi yang dapat diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual terkait masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan PPDB, terutama di daerah yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang beragam.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, terdapat beberapa temuan utama yang memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK Jawa Timur. Temuan-temuan ini berkaitan dengan akses informasi, kualitas fasilitas pendidikan, dan hubungan dengan industri, yang berperan penting dalam menentukan kualitas implementasi kebijakan PPDB serta pemerataan akses pendidikan di provinsi ini.

3.1. Akses Informasi yang Terbatas

Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah akses informasi yang terbatas, terutama di daerah terpencil. Banyak orang tua dan siswa yang melaporkan kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses PPDB, program keahlian yang ditawarkan di SMK, dan syarat pendaftaran. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan, di mana infrastruktur teknologi masih terbatas dan tingkat literasi digital rendah.

Menurut Tijou (2019), salah satu aspek penting dalam pemerataan pendidikan adalah distribusi informasi yang memadai. Di banyak daerah terpencil, informasi tentang PPDB cenderung hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu yang memiliki akses ke internet atau media cetak. Sebagai contoh, di beberapa wilayah pedesaan di Jawa Timur, orang tua dan siswa sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kapan dan bagaimana mereka bisa mendaftar ke sekolah, atau program keahlian apa saja yang tersedia di SMK. Hal ini berimbas pada pilihan sekolah yang terbatas, karena orang tua dan siswa tidak tahu semua pilihan yang ada, sehingga mereka cenderung memilih sekolah terdekat yang dikenal.

Keterbatasan ini semakin parah dengan rendahnya tingkat penyuluhan atau sosialisasi oleh pihak sekolah atau pemerintah daerah mengenai proses PPDB. Sejumlah responden mengungkapkan bahwa mereka hanya mengetahui informasi melalui mulut ke mulut atau media sosial yang kurang resmi. Oleh karena itu, akses informasi yang terbatas ini menyebabkan siswa dari daerah yang kurang berkembang memiliki peluang yang lebih kecil untuk memilih program pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMKN 1 Tegalsari Bapak Gatot Kurnianta dengan hasil sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi fokus utama kebijakan PPDB SMK Tahun 2024 di sekolah Bapak?

Fokus utama kebijakan PPDB SMK Tahun 2024 adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses PPDB berjalan secara transparan, adil, dan berdasarkan pada kebutuhan industri yang relevan. Kami juga berupaya agar seluruh calon peserta didik dapat memilih program keahlian yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta yang memiliki prospek kerja yang baik di dunia industri. Dengan demikian, selain kualitas pendidikan, kami juga memastikan adanya hubungan yang erat antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kita juga mengikuti juknis yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

2. Apa yang membedakan kebijakan PPDB SMK Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya?

Pada tahun 2024, terdapat peningkatan pada sistem seleksi yang lebih berbasis pada sistem daring (online) untuk mempermudah akses bagi calon peserta didik, termasuk integrasi data yang lebih efisien. Kami juga memperkenalkan kebijakan afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan memberikan kuota khusus untuk mereka yang memiliki prestasi non-akademik di bidang keterampilan. PPDB prestasi hasil lomba 25 %. 2. Jalur Zonasi 10 % dan 3. Jalur Prestasi Akademik/ Nilai Raport 65 %.

3. Bagaimana dengan kuota penerimaan tahun 2024? Apakah ada perubahan signifikan

Untuk tahun 2024, kami mengalami penyesuaian kuota berdasarkan kapasitas fasilitas dan kebutuhan industri. Kuota penerimaan sedikit ditambah pada beberapa program keahlian yang memiliki kebutuhan lebih tinggi di dunia kerja. Kuota Tahun ini adalah 2 rombel untuk semua kompetensi keahlian kecuali Akuntansi sebanyak 4 Rombel dan setiap rombel sebanyak 36 siswa.

4. Apa saja persyaratan untuk calon peserta didik yang ingin mendaftar?

Persyaratan utama adalah calon peserta didik harus memenuhi nilai minimal dari ujian akhir kelas 9, serta mengikuti seleksi berdasarkan jalur yang dipilih baik jalur prestasi, jalur afirmasi, maupun jalur umum. Selain itu, untuk beberapa program keahlian tertentu, kami akan melakukan tes keterampilan atau wawancara untuk mengetahui minat dan bakat siswa di bidang yang dipilih. Sebelum mendaftar juga diwajibkan untuk menyertakan hasil tes kesehatan dan tes fisik.

5. Apa peran dunia industri dalam kebijakan PPDB tahun 2024 ini?

Dunia industri berperan sangat penting dalam kebijakan PPDB SMK Tahun 2024. Kami terus bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan sektor industri untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini. Selain itu, melalui program magang dan praktik kerja, peserta didik SMK dapat langsung merasakan dunia kerja yang sesungguhnya. Kami juga memperluas kesempatan magang di berbagai perusahaan untuk menambah keterampilan dan pengalaman mereka.

6. Apa harapan Kepala Sekolah terhadap implementasi PPDB SMK Tahun 2024?

Harapan kami adalah agar kebijakan PPDB Tahun 2024 ini dapat menciptakan peserta didik yang siap bersaing di dunia kerja dengan keterampilan yang relevan. Kami juga berharap proses PPDB ini berjalan dengan lancar dan dapat menjangkau siswa yang memiliki potensi besar, baik secara akademik maupun non akademik. Dengan demikian, lulusan SMK dapat memenuhi harapan dunia industri dan menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Dan kami juga berharap anak-anak yang diterima bisa nyaman, aman dalam belajar disekolah dan bisa memberikan prestasi yang terbaik selama belajar disini.

Hasil Wawancara dengan guru khususnya dalam hal ini ketua menjelaskan kebijakan PPDB tahun ini hampir sama dengan tahun2 sebelumnya, hanya kebijakan tes fisik Tahun ini harus mendatangkan pihak PKM untuk datang ke sekolah untuk melakukan tes kesehatan, setelah itu baru kegiatan tes fisik bisa dilakukan dan lanjut ke proses pengambilan PIN, pendaftaran, pengumuman dan daftar ulang. Hasil seleksi juga mujrni hasil dari perangkan yang ada dan bisa diakses lewat laman www.ppdjatim.net yang dapat diakses secara langsung oleh calon peserta didik dan orang tua.

Hasil Wawancara dengan Orang Tua dan Siswa bertujuan untuk menggali pengalaman mereka selama proses pendaftaran PPDB, termasuk apakah mereka merasa informasi mengenai PPDB mudah diakses dan apakah mereka merasa kebijakan zonasi menguntungkan atau justru membatasi pilihan mereka dari hasil jawaban salah satu wali murid adalah PPDB SMK yang sangat transparan dan mudah di akses, pelayanan juga baik, ramah dan sangat membatu saat pendaftaran sampai selesai, tetapi ada sebagian wali murid yang masih bingung terhadap jalur pendaftaran yang ada karena syarat yang diminta juga berbeda-beda, selanjutnya alur dan tempat pendaftaran yang berpindah-pindah menyebabkan kurang efektif dan banyak terjadi antrian saat pendaftaran, Proses pengambilan PIN yang cukup lama sehingga membuat antrian yang panjang dan harus kembali ke esokan harinya.

3.2. Kualitas Fasilitas yang Tidak Merata

Hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam kualitas fasilitas yang tersedia di SMK di Jawa Timur. SMK yang terletak di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan modern, seperti ruang komputer, laboratorium teknik, serta peralatan praktik yang memadai untuk mendukung pembelajaran keterampilan. Sementara itu, SMK di daerah pedesaan dan daerah dengan akses terbatas terhadap sumber daya, sering kali menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas yang memadai.

Sejumlah kepala SMK di daerah pedesaan mengungkapkan bahwa peralatan untuk praktik keterampilan seringkali sudah usang dan tidak memadai, misalnya, laboratorium komputer yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau peralatan praktek teknik yang minim. Akibatnya, siswa yang belajar di SMK daerah pedesaan sering kali tidak mendapatkan pengalaman yang setara dengan siswa di kota besar, yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan canggih. Hal ini mengarah pada ketimpangan dalam kualitas pendidikan, yang dapat mempengaruhi kemampuan lulusan SMK dalam menghadapi dunia kerja, terutama yang membutuhkan keterampilan teknis yang sesuai dengan perkembangan industri terkini.

Prasetyo (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana di SMK dapat menghambat upaya sekolah untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja. Hal ini karena keterampilan praktis yang diajarkan di SMK sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, ketimpangan fasilitas ini memperburuk kondisi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta mengurangi efektivitas implementasi kebijakan PPDB, yang bertujuan untuk memberi kesempatan yang setara kepada siswa di seluruh wilayah.

3.3. Kurangnya Keterkaitan dengan Dunia Industri

Temuan berikutnya yang mencuat dari penelitian ini adalah kurangnya keterkaitan antara program pendidikan di SMK dengan dunia industri. Meskipun SMK memiliki tujuan utama untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap bekerja di industri, banyak SMK di Jawa Timur yang masih menghadapi kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan industri lokal. Hal ini menyebabkan program keahlian yang diajarkan di SMK tidak selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Wawancara dengan kepala SMK dan guru menunjukkan bahwa sebagian besar SMK di Jawa Timur, terutama yang berada di daerah terpencil, belum memiliki program magang atau kerja sama yang efektif dengan industri setempat. Sebagian besar sekolah hanya mengandalkan kurikulum yang disusun oleh Dinas Pendidikan, tanpa memperhitungkan tren dan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Prasetyo (2022) mencatat bahwa kurangnya kerjasama antara SMK dan industri menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sebagai contoh, beberapa SMK yang mengajarkan keterampilan teknis seperti otomotif atau teknik informatika, tidak memiliki akses langsung ke industri terkait yang dapat memberikan pelatihan praktis bagi siswa.

Kondisi ini menyebabkan lulusan SMK sulit untuk bersaing di dunia kerja, karena keterampilan yang mereka pelajari di sekolah tidak selalu cocok dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan dunia industri agar program keahlian yang diajarkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala SMKN 1 Tegalsari terkait dengan hubungan dengan DU/ DI sudah sangat baik dan relevan sekali dengan kompetensi yang sudah ada disekolah, tetapi perlu ada kerjasama yang lebih baik lagi terkait dengan penempatan PKL, magang guru dan juga rekrutmen tenaga kerja agar kualitas pendidikan di SMK emakain baik lagi.

3.4. Indikator keberhasilan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Indikator keberhasilan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Jawa Timur dapat dilihat dari berbagai aspek yang mencakup proses pendaftaran, penerimaan, hingga kualitas pendidikan yang tercapai. Beberapa indikator keberhasilan PPDB SMK di Jawa Timur antara lain :

1. Tercapainya Kuota Penerimaan yang Sesuai
Keberhasilan PPDB dapat diukur dari seberapa banyak siswa yang diterima sesuai dengan kapasitas atau kuota yang ditetapkan. Sekolah yang berhasil mengelola jumlah pendaftar sesuai dengan kapasitas menunjukkan keberhasilan dalam proses seleksi.
2. Penyebaran Geografis Peserta Didik

Keberhasilan PPDB juga bisa diukur berdasarkan pemerataan penyebaran peserta didik di wilayah Jawa Timur. Jika peserta didik tersebar secara adil di seluruh daerah, maka sistem PPDB dapat dikatakan berhasil dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan.

3. Peningkatan Akses Pendidikan bagi Siswa dari Keluarga Tidak Mampu
Salah satu indikator keberhasilan PPDB adalah keberhasilan dalam memberikan akses pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu atau yang berasal dari daerah terpencil. Program beasiswa atau kuota khusus untuk siswa miskin sering menjadi bagian dari PPDB yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam pemerataan kesempatan.
4. Transparansi dan Keadilan dalam Proses Seleksi
Keberhasilan PPDB juga diukur dari seberapa transparan dan adil proses seleksi berlangsung. Keberhasilan ini tercermin dari penerimaan peserta didik yang tidak terbentur pada praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), dan hasil seleksi diterima secara objektif oleh masyarakat.
5. Kesesuaian Kompetensi Kejuruan dengan Permintaan Dunia Industri
Indikator keberhasilan PPDB juga melibatkan kesesuaian antara jurusan yang dipilih oleh peserta didik dengan kebutuhan dan perkembangan industri di Jawa Timur. SMK yang memiliki jurusan sesuai dengan permintaan dunia kerja menunjukkan keberhasilan dalam merancang kurikulum dan melakukan seleksi berdasarkan kebutuhan pasar.
6. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PPDB
Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses PPDB dapat menjadi indikator keberhasilan. Semakin banyaknya masyarakat yang ikut serta dan memilih sekolah SMK yang tepat untuk anak-anak mereka menunjukkan kesadaran dan kepercayaan terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah.
7. Tingkat Kepuasan Orang Tua dan Siswa
Keberhasilan PPDB dapat dinilai dari tingkat kepuasan siswa dan orang tua terhadap proses penerimaan, fasilitas pendidikan, serta pelayanan yang diberikan oleh sekolah. Survei atau evaluasi terkait kepuasan orang tua dan siswa sering digunakan untuk menilai aspek ini.
8. Pemanfaatan Teknologi dalam PPDB
Penggunaan teknologi dalam proses PPDB, seperti sistem online yang memudahkan pendaftaran dan transparansi dalam proses seleksi, juga dapat menjadi indikator keberhasilan. Sistem yang efisien, mudah diakses, dan mengurangi kemungkinan kecurangan menunjukkan kesuksesan dalam pelaksanaan PPDB berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menunjukkan bagaimana PPDB di SMK Jawa Timur dapat dinilai dari berbagai sisi, baik itu terkait dengan proses administrasi, pemerataan akses pendidikan, kesesuaian pendidikan dengan dunia industri, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan dunia kerja.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akses informasi, kualitas fasilitas pendidikan, dan hubungan dengan dunia industri merupakan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas kebijakan PPDB di SMK Jawa Timur. Akses informasi yang terbatas di daerah terpencil menyebabkan kesulitan bagi siswa dan orang tua dalam mengakses informasi penting mengenai proses pendaftaran dan program yang tersedia. Ketidakmerataan fasilitas antara SMK di daerah perkotaan dan pedesaan memperburuk ketimpangan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Selain itu, kurangnya kemitraan antara SMK dan dunia industri menyebabkan program keahlian yang diajarkan di sekolah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan SMK kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dalam memperbaiki akses informasi, distribusi fasilitas pendidikan yang lebih merata, serta memperkuat hubungan antara SMK dan dunia industri untuk memastikan bahwa program pendidikan yang diberikan relevan dan dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Referensi

- Atika Mujahidah, Mala Nur Kumairo, & Mufarrihul Hazin. (2024). Evaluasi program PPDB sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo menggunakan model CIPP . Sindoro: Cendikia Pendidikan, 4(6), 44–54. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v4i6.3394>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Petunjuk Teknik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 Nomor : 188.4/711/101.7.1/2024
- Perbandingan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMK Negeri dan Swasta di Jawa Timur, Sari, N., & Maulana, A., 2021
- Prasetyo, Y. (2022). Studi Kasus Implementasi PPDB di Daerah Perkotaan dan Pedesaan: Pembelajaran untuk Jawa Timur. *Jurnal Sosial Humaniora*, 30(2), 65-78.
- Putra, D. M. D. U., Mahendra, G. S., & Mulyadi, E. (2022). Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru pada SMP Negeri 3 Cibal Berbasis Web. *INSERT: Information System and Engineering Technology Journal*, 3(1), 42–52.
- Rahayu, N. (2020). Evaluasi Kebijakan Zonasi dalam PPDB: Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 38(4), 99-111.
- Raihan, F. & Gunawan, R. (2021). *Pemerataan Pendidikan di Indonesia: Teori dan Praktik dalam Kebijakan PPDB Berbasis Zonasi*. Buku Referensi Pendidikan, Jakarta: Penerbit Pendidikan Indonesia.
- Septriana, N. (2021). Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Pada SMK Bandara. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*, 8(1), 60–67.
- Siregar, E. & Rahardjo, T. (2020). Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(3), 45-58.
- Tijou, R. (2019). Akses Informasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru: Implikasinya terhadap Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Sosial Humaniora*, 18(2), 65-78.
- Wijayanti, S. (2021). Tantangan Implementasi Sistem PPDB Berbasis Zonasi di Daerah Terpencil: Kasus di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 29(1), 17-30.